

PENYERBUAN RRC KE VIETNAM: SUATU PELAJARAN?

Oct. Ovy NDOUK*

PENDAHULUAN

Tanggal 17 Pebruari 1979, RRC melancarkan serangan besar-besaran ke dalam wilayah Vietnam dari 14 jurusan di sepanjang perbatasannya dengan Vietnam (dari Lai Chau di sebelah barat sampai Quang Ninh di sebelah timur). Menurut pihak RRC, penyerbuan ini merupakan tindakan untuk menghukum Vietnam karena tindakan provokasi bersenjatanya di perbatasan dan bahkan di dalam wilayah RRC. Alasan ini yang diungkapkan secara terbuka oleh Pemerintah RRC.

Hubungan RRC dengan Vietnam telah mulai memburuk sejak Vietnam terlibat dalam bentrokan dengan tentara perbatasan Kamboja di perbatasan kedua negara itu pada pertengahan tahun 1977 (RRC merupakan pendukung utama Pemerintah Khmer Merah pimpinan Pol Pot di Kamboja, yang sejak kemenangannya tahun 1975 berorientasi ke Beijing). Selanjutnya pada pertengahan tahun 1978 RRC mengurangi bantuannya kepada Vietnam sebagai pembalasan terhadap apa yang dituduhkannya tindakan Vietnam mengusir orang-orang Cina dan keturunan Cina dari Vietnam. Di samping itu, situasi perbatasan RRC—Vietnam juga semakin memburuk sejak awal tahun 1978. Bentrokan bersenjata antara tentara perbatasan kedua negara maupun saling tuduh dan protes melalui saluran diplomatik, berulang kali terjadi. Keadaan seperti itu terus berlangsung dan mencapai puncaknya ketika RRC melancarkan penyerbuan besar-besaran ke dalam wilayah Vietnam. Bersamaan dengan penyerbuannya itu, Pemerintah RRC menghimbau semua negara di dunia untuk menekan Vietnam agar menarik semua pasukannya dari Kamboja. Dari kenyataan ini, para pengamat di Beijing berpendapat bahwa tujuan RRC menghukum Vietnam antara lain ialah untuk menonjolkan atau menghidupkan kembali masalah Kamboja yang telah berada di bawah

* Staf CSIS

pengaruh Vietnam (tanggal 7 Januari 1979, Phnom Penh jatuh ke tangan kaum pemberontak Kamboja KNUFNS yang dibantu sepenuhnya oleh pasukan Vietnam). Sementara itu, para diplomat Barat mengatakan bahwa tindakan RRC menyerang Vietnam atau "bertindak sebagai polisi di Asia Tenggara untuk pertama kali dalam 30 tahun dengan menimbulkan korban" merupakan pernyataan sikap RRC yang menolak Federasi Indocina yang menempatkan Laos dan Kamboja di bawah proteksi Vietnam. Selain itu RRC juga ingin memberi contoh kepada AS agar tidak mentolerisasi begitu saja tingkah-laku Kuba yang selalu bertindak sebagai kaki-tangan Uni Soviet di bumi bagian barat, sama seperti "Kuba Timur" (Vietnam).

Jika dihubungkan dengan peranan atau keterlibatan RRC dalam pergolakan di Indocina, khususnya dalam sengketa antara Vietnam dan Kamboja, maka kebenaran dari pendapat atau penafsiran dari para pengamat dan diplomat Barat di atas, mungkin merupakan suatu gambaran yang dapat menunjukkan alasan lain dari serbuan RRC ke dalam wilayah Vietnam. Untuk mengetahui beberapa kemungkinan dari alasan penyerbuan RRC ke Vietnam itu, maka perlu kiranya ditinjau data-data mengenai peningkatan ketegangan antara RRC dan Vietnam, terutama yang terjadi sejak akhir tahun 1978, baik karena situasi di Indocina maupun karena situasi perbatasan kedua negara itu.

I. SENGKETA VIETNAM—KAMBOJA

Untuk pertama kalinya sejak kemenangan kaum komunis di Indocina pada tahun 1975, hubungan Vietnam dengan Kamboja mulai memburuk ketika kedua negara itu terlibat dalam *sengketa perbatasan* pada pertengahan tahun 1977. Sejak itu pasukan perbatasan kedua negara sering terlibat dalam bentrokan bersenjata yang kemudian meningkat menjadi perang perbatasan ketika pasukan Vietnam memasuki wilayah Kamboja pada akhir tahun 1977 dan menduduki daerah Paruh Bebek serta tempat-tempat persawahan yang subur di Lembah Sungai Mekong. Tanggal 31 Desember 1977 Pemerintah Kamboja memutuskan hubungan diplomatik dengan Vietnam.¹ Sementara itu insiden-insiden perbatasan masih terus berlangsung bahkan menjadi lebih gawat lagi karena terlibatnya negara-negara besar. RRC yang sejak kemenangan komunis (Khmer Merah) tahun 1975 merupakan satu-satunya negara yang bersahabat dan memberikan bantuan pembangunan kepada Kamboja, mendukung Kamboja dalam pertikaiannya dengan Vietnam, sedang di lain pihak Vietnam dibantu oleh Uni Soviet. Dengan demikian perang perbatasan Vietnam—Kamboja ini boleh dikatakan berada di bawah bayangan pertentangan RRC dan Uni Soviet, yang sejak lama telah saling bermusuhan.

1 "Asia 1979 Yearbook", *Far Eastern Economic Review*, hal. 319

Dalam situasi yang demikian itu, Vietnam mencoba mencari penyelesaian sengketta perbatasan itu dengan menawarkan perundingan perdamaian dan gencatan senjata,¹ tetapi pihak Kamboja menolaknya dan mengatakan bahwa Kamboja akan melakukan perundingan jika Vietnam menghentikan agresinya terhadap Kamboja. Sementara perang perbatasan itu terus meningkat, keadaan dalam negeri Kamboja menjadi sulit dengan timbulnya pemberontakan yang ingin menggulingkan Pemerintah Pol Pot. Situasi ini dimanfaatkan oleh pihak Vietnam dengan cara membantu perjuangan kaum pemberontak Kamboja itu. Awal Nopember 1978, pasukan-pasukan pemberontak Kamboja itu berhasil menguasai pangkalan militer di propinsi Kompong Cham yang berbatasan dengan Vietnam, dan menewaskan ratusan tentara Pemerintah Khmer Merah di propinsi Ratanakiri. Kabarnya pasukan Vietnam terlibat langsung dalam pertempuran antara kaum pemberontak dan pasukan Pemerintah Kamboja itu.²

Sementara itu, suatu delegasi RRC yang dipimpin Wakil Ketua Partai Komunis Cina, Wang Dongxing, mengadakan kunjungan ke Kamboja tanggal 5-9 Nopember 1978. PM Kamboja, Pol Pot, mengatakan kepada delegasi RRC itu segera setelah tiba di Phnom Penh, bahwa yang terbaik bagi Vietnam ialah segera menghentikan agresinya terhadap Kamboja, dan bersedia menandatangani perjanjian persahabatan dan non-agresi demi kepentingan kedua negara, kawasan Asia Tenggara dan Asia umumnya, bahkan seluruh dunia. Pada kesempatan itu pimpinan delegasi RRC, Wang Dongxing, menjamin bahwa RRC mendukung perjuangan rakyat Kamboja dalam persengketaan-nya dengan Vietnam.³ Kunjungan delegasi RRC ini dianggap sangat penting karena terjadi tepat pada saat meningkatnya ketegangan antara Kamboja dan Vietnam. Meskipun demikian, jaminan yang diberikan pemimpin RRC itu tidak memberikan harapan yang lebih besar kepada Kamboja karena dukungan RRC itu hanya terbatas pada bantuan senjata dan penasehat yang diperlukan. Padahal yang sangat dibutuhkan oleh Kamboja bukan hanya senjata tetapi juga tenaga manusia (tentara). Penegasan dari sifat dukungan RRC terhadap Kamboja -- terlepas dari kepentingan strateginya dengan Kamboja --juga telah dinyatakan oleh para pemimpin RRC dalam pembicaraan tingkat tinggi dengan delegasi militer Kamboja yang dipimpin bekas Menteri Pertahanan Kamboja, Son Sen, yang berkunjung ke Beijing pada bulan Agustus 1978. Dijelaskan bahwa berdasarkan prinsip yang telah lama berlaku dan juga karena alasan-alasan diplomasi-politik yang konkrit, RRC tidak dapat datang menyelamatkan Kamboja pada saat Vietnam melakukan invasi. Malahan,

1 Lihat Oskar Weggel, "Indochina's Troubled Borders", *Aussen Politik*, Vol. 29. 4/1978, hal. 438

2 *Antara*, 12-11-1978/AB

3 *Antara*, 7-11-1978/A

pemimpin-pemimpin RRC menganjurkan kepada Son Sen agar mulai mempersiapkan suatu perlawanan gerilya untuk jangka waktu yang lama.¹

Tanggal 3 Desember 1978, Vietnam mengumumkan bahwa pasukan pemberontak yang terdiri dari sejumlah besar tawanan perang dan para pengungsi sipil Kamboja di Vietnam telah terorganisasi dalam suatu front yang dinamakan Front Persatuan Nasional bagi Keselamatan Kamboja (KNUFNS = Kampuchea National United Front for National Salvation), dan dipimpin oleh Heng Samrin yang relatif tidak begitu dikenal. Mereka berikrar untuk menjatuhkan Pemerintah Phnom Penh.² Vietnam menyatakan mendukung gerakan KNUFNS itu. Tajuk rencana surat kabar partai komunis Vietnam "Nhan Dan" mengemukakan bahwa mendepak PM Kamboja Pol Pot merupakan tugas paling penting untuk menyelamatkan rakyat dan negara. Iktikad gerakan KNUFNS untuk melancarkan perang gerilya guna menjatuhkan Pemerintah Phnom Penh adalah tepat sekali.³ Di lain pihak, RRC (juga AS dan Muangthai) memperingatkan Vietnam agar jangan meneruskan rencananya untuk mendestabilisasi Kamboja dengan kedok KNUFNS. RRC juga mengecam pembentukan KNUFNS itu sebagai suatu organisasi kontra revolusioner untuk menutupi agresi militer Vietnam terhadap Kamboja, sedang rejim Pol Pot mencapnya sebagai boneka Hanoi.⁴ Sementara itu, kantor berita Uni Soviet, Tass, tanggal 13 Desember 1978 mengumumkan dukungan Uni Soviet terhadap KNUFNS, dan menyatakan bahwa tidaklah begitu mengejutkan bila Beijing menjadi marah melihat terbentuknya KNUFNS, karena dengan menegaskan dukungannya terhadap rejim Phnom Penh, para pemimpin RRC telah menunjukkan niat mereka untuk tetap campur tangan dalam urusan dalam negeri Kamboja dan mengadunya dengan Vietnam Sosialis.⁵

Dengan meningkatnya tekanan militer yang intensif dari Vietnam dan terbentuknya KNUFNS maka perang perbatasan Kamboja—Vietnam telah memasuki tahap baru yang menentukan. Dalam pada itu Vietnam masih juga mengirim nota kepada Dewan Keamanan PBB yang menuduh RRC menghasut agresi Kamboja dalam usaha mendominasi daerah itu. Menjawab tuduhan Vietnam itu, Wakil RRC di PBB, Chen Chu, menyatakan dalam suratnya kepada Dewan Keamanan PBB bahwa agresi dan subversi Vietnam di Kambo-

-
- 1 Nayan Chanda, "Cambodia: Fifteen Days that Shook Asia", *Far Eastern Economic Review*, January 19, 1979, hal. 12
 - 2 John C. Donnell, "Vietnam 1979: Year of Calamity", *Asian Survey*, Vol. XX, No. 1, University of California Press, January 1980, hal. 20-21
 - 3 *Antara*, 5-12-1978/B
 - 4 *Suara Karya*, 8-12-1978
 - 5 *Antara*, 14-12-1978/B

ja harus segera diakhiri demi kepentingan perdamaian dan stabilitas di Indocina. Pemerintahnya selalu ingin mencari penyelesaian perbedaan-perbedaan internasional melalui konsultasi-konsultasi atau perundingan-perundingan bersahabat, dan menentang semua bentuk agresi bersenjata atau ancaman kekuatan.¹

Akhir Desember 1978 pemberontak KNUFNS menyatakan dirinya sebagai pemerintah yang sah di Kamboja. Bersamaan dengan itu, pada tanggal 25 Desember 1978, sekitar 120.000 tentara Vietnam dengan dukungan sejumlah besar tank, kendaraan lapis baja dan pesawat pembom tempur, yang membantu pasukan pemberontak KNUFNS (berjumlah sekitar 15-20.000 orang), melancarkan serangan besar-besaran ke dalam wilayah Kamboja dan berhasil menduduki sebagian besar wilayah Kamboja termasuk ibukota Phnom Penh pada tanggal 7 Januari 1979.²

Jatuhnya Phnom Penh menimbulkan reaksi dan tanggapan dari berbagai negara yang sebagian besar mengecam dan menyerukan penarikan pasukan asing dari Kamboja. Uni Soviet yang sejak semula mendukung Vietnam menyatakan dukungannya terhadap pemberontak KNUFNS yang merebut pemerintahan di Kamboja. Sedang pihak RRC selain mengecam, juga menyatakan bahwa jatuhnya Phnom Penh sudah dapat diperkirakan, tetapi tidak berarti pertempuran sudah selesai, karena Kamboja akan terus mengangkat senjata.³ Kantor berita Cina *Xinhua* tanggal 14 Januari 1979 menyatakan bahwa RRC tetap mendukung Khmer Merah (Pemerintah Pol Pot) sebagai pemerintah yang sah, dan tetap membantu perjuangannya sampai mencapai kemenangan.⁴

Berita dari Tokyo yang mengutip kantor berita RRC *Xinhua* menyatakan bahwa melihat keadaan di Kamboja yang semakin parah, RRC akan memberikan bantuan kepada Kamboja dalam berbagai bentuk. Jika perang agresi Vietnam dibiarkan terus berlarut, maka akan terjadi akibat yang tidak kita duga sama sekali. Karena itu, invasi Vietnam tidak bisa dilihat sebagai konflik perbatasan saja atau masalah regional, tetapi mau tak mau harus dipecahkan oleh seluruh dunia. Sebelumnya, Ketua Partai Komunis Cina/PM Hua Guofeng mengatakan pada pertemuannya dengan Ketua Dewan Eropa, Emilio Colombo (yang sedang berkunjung ke RRC), di Beijing tanggal 5 Januari 1979 bahwa ia prihatin atas peperangan di Kamboja. Serangan Vietnam di Kamboja merupakan bagian dari suatu "persekongkolan besar"

1 *Ibid.*, 14-12-1978/A

2 *Antara*, 8-1-1979/B

3 *Kompas*, 7-1-1979

4 *Antara*, 15-1-1979/B

Moskow untuk mengembangkan sayap pengaruhnya di Asia Tenggara. RRC mengamati pertikaian itu dengan "kewaspadaan yang luar biasa". Pernyataan ini menunjukkan besarnya perhatian dan terutama kekuatiran RRC akan kemungkinan masuknya pengaruh Uni Soviet di kawasan Asia Tenggara melalui Vietnam yang berarti merupakan ancaman bagi kepentingan strategi RRC.

Sementara itu, kantor berita Vietnam, VNA, tanggal 2 Pebruari 1979 menyatakan bahwa pernyataan Wakil PM RRC Deng Xiaoping dan bekas Kepala Negara Kamboja Pangeran Norodom Sihanouk mengenai ijin yang diberikan Muangthai bagi pengiriman senjata dari RRC kepada pasukan Khmer Merah melalui wilayah Muangthai, merupakan provokasi pihak RRC. Tindakan RRC mengirim persenjataan itu merupakan pelanggaran terhadap hak-hak rakyat Kamboja untuk menentukan nasib sendiri.¹

II. SENGKETA PERBATASAN RRC—VIETNAM

Timbulnya sengketa antara RRC dan Vietnam ditandai dengan insiden-insiden yang terjadi di sepanjang perbatasan kedua negara itu. Di samping itu, terdapat laporan yang mengatakan bahwa kapal-kapal Cina juga pernah terlibat dalam bentrokan kecil-kecilan dengan kapal-kapal Vietnam di perairan dekat Kepulauan Spratley (RRC maupun Vietnam sama-sama mengklaim gugus Kepulauan Spratley dan Paracel merupakan bagian dari wilayahnya). Situasi perbatasan kedua negara itu semakin memburuk sejak awal tahun 1978 ketika pasukan perbatasan mereka terlibat dalam bentrokan bersenjata yang menewaskan 30 orang Vietnam.

Situasi perbatasan RRC—Vietnam itu hampir sama buruknya dengan situasi yang terjadi pada waktu yang sama di perbatasan Kamboja—Vietnam. RRC yang mendukung Pemerintah Kamboja, berusaha memancing Vietnam dengan mengobarkan pertempuran tank besar-besaran di perbatasannya dengan maksud agar Vietnam mengalihkan perhatiannya dan mengendorkan tekanannya terhadap Kamboja. Meskipun untuk sementara waktu tampak ada hasilnya, namun Vietnam dengan caranya sendiri malah menciptakan suasana lain dengan cara mempersulit kehidupan orang-orang Cina di Vietnam sehingga memaksa mereka untuk keluar dari Vietnam. Kenyataan ini dijawab oleh pihak RRC dengan menyiapkan sekitar 20 pesawat jet tempurnya di Kunming (Cina bagian selatan). Sumber-sumber AS yang mendapat informasi menyatakan bahwa setelah normalisasi hubungannya dengan Washington, kekuatan RRC yang ditempatkan di sepanjang Selat Taiwan

1 *Antara*, 3-2-1979/B

telah dipindahkan ke perbatasan dengan Vietnam dan Uni Soviet. Juga dikatakan bahwa kekuatan udara, darat dan laut Cina di propinsi Guangxi dan pasukannya di Yunnan telah siap-siagakan.¹ Ketegangan yang memuncak terus berlangsung, dan bentrokan bersenjata masih terus terjadi meskipun masih terbatas pada tembak-menembak di daerah sepanjang perbatasan.

Awal Nopember 1978 pasukan RRC menyerang kota tapal batas di dalam wilayah Vietnam dan terlibat dalam pertempuran seru dengan pasukan Vietnam. Pasukan RRC itu berhasil menduduki posisi perbukitan di daerah Trung Khanh propinsi Cao Lang. Sehubungan dengan keadaan ini Kementerian Luar Negeri Vietnam mengeluarkan sebuah statement yang menuntut RRC agar menghentikan provokasinya itu. Sementara itu diberitakan bahwa Uni Soviet telah berjanji untuk mendukung Vietnam menghadapi RRC, dan mencela peningkatan militer RRC di sepanjang perbatasan dengan Vietnam.² Bagi pihak RRC, peningkatan kekuatan militernya itu, agaknya lebih menyerupai suatu persiapan dalam kekuatirannya terhadap gerakan Vietnam yang tampaknya kian mendekat ke Uni Soviet. RRC kuatir bahwa posisinya akan terancam baik langsung dari perbatasannya dengan Uni Soviet, sebagai musuh lamanya, maupun dari perbatasannya dengan Vietnam, yang dianggap sebagai kaki-tangan Uni Soviet. Kekuatiran RRC ini tampaknya semakin bertambah lagi ketika Vietnam dan Uni Soviet menandatangani Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama (yang berlaku selama 25 tahun) di Moskow tanggal 3 Nopember 1978, yang antara lain menyatakan bahwa kedua negara sepakat untuk: (a) mempererat hubungan persahabatan dan kerja sama berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama guna memenuhi kepentingan rakyat masing-masing, memperluas hubungan ekonomi, ilmu pengetahuan, teknik dan kebudayaan; Uni Soviet juga setuju untuk meningkatkan bantuannya guna membangun perekonomian Vietnam; (b) membantu memperkokoh perdamaian dan keamanan di Asia dan seluruh dunia; (c) mengambil "tindakan-tindakan seperlunya dan efektif" di dalam peristiwa serangan atau ancaman serangan terhadap salah satu dari keduanya.³

Tanggal 4 Nopember 1978, RRC memberikan reaksinya atas penandatanganan Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama Vietnam—Uni Soviet itu, dengan menuduh Vietnam menjadi alat Uni Soviet karena bergerak lebih dekat ke Moskow melalui penandatanganan perjanjian tersebut. Di samping itu RRC juga menuduh Vietnam menyiapkan agresi yang luas terhadap Kamboja, dan Moskow mendukung tindakan semacam itu dengan mengirim senjata dan perlengkapan perang lainnya kepada Vietnam. Selanjutnya dikatakan

1 Nayan Chanda, "Blietzkrieg on Cambodia", *Far Eastern Economic Review*, January-12, 1979, hal. 14

2 *Suara Karya*, 3-11-1978

3 *Antara*, 4-11-1978/AB, & *Kompas*, 13-11-1978

bahwa tentara Vietnam telah memasuki wilayah RRC dan memulai tembakan sehingga bentrokan dengan tentara perbatasan RRC yang mengakibatkan sejumlah tentara dan orang-orang sipil Cina tewas atau luka-luka.¹ Tanggal 7 Nopember 1978, Kementerian Luar Negeri RRC menyampaikan nota protes kepada Kedutaan Besar Vietnam di Beijing, mengenai masalah insiden perbatasan kedua negara yang terjadi pada awal Nopember 1978, yang isinya antara lain menuntut Vietnam agar segera membebaskan orang-orang Cina yang ditahannya dan mengembalikan mayat-mayat orang Cina yang telah dibunuh. Vietnam akan menanggapi akibatnya jika tidak mengindahkan tuntutan itu.²

Tanggal 11 Desember 1978, Wakil Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional RRC, Wei Guoqing, menyerukan kepada rakyat di daerah otonom Guangxi Zhuang agar meningkatkan kesiagaan terhadap Vietnam, dan mengecam Vietnam karena telah menjadi sebuah "Kuba" di Asia. Pada kesempatan yang sama, Ketua Komite Revolusioner Guangxi Zhuang, Jiao Xiaoguang, mengulangi perlunya persiapan-persiapan perang untuk menghadapi negara tetangga komunis itu (Vietnam), dan menyatakan bahwa Cina tidak akan melakukan invasi kalau tidak diserang, namun akan melancarkan serangan apabila mereka diserang.³ Tampaknya kecaman terhadap Vietnam dan seruan untuk bersiap-siaga guna menghadapi perang dengan Vietnam, bertalian dengan ditandatanganinya Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama antara Vietnam dan Uni Soviet yang membawa Vietnam lebih dekat dengan Moskow, dan meningkatnya perang perbatasan Kamboja—Vietnam serta dukungan Vietnam terhadap pemberontak Kamboja yang telah membentuk front KNUFNS (tanggal 2 Desember 1978) dan bertekad menggulingkan Pemerintah Pol Pot yang pro RRC. Sementara itu, tanggal 12 dan 13 Desember 1978, Kementerian Luar Negeri RRC menyampaikan protes kepada Kedutaan Besar Vietnam di Beijing, yang menuduh Vietnam menciptakan insiden-insiden berdarah dalam serangkaian pelanggaran perbatasan di Teluk Peipu dan sepanjang perbatasan darat kedua negara.⁴ Dalam pada itu, kantor berita Cina, *Xinhua*, memberitakan bahwa Wakil PM Li Xiannian telah memperingatkan Vietnam mengenai tindakan provokasinya dengan mengatakan bahwa kesabaran Cina ada batasnya dan jangan menganggap Cina lemah atau mudah ditakut-takuti.⁵ Persiapan dan peringatan Cina itu tampaknya diimbangi juga oleh Vietnam. Komite Militer Partai Komunis Vietnam menginstruksikan Angkatan Bersenjata dan warga sipil Vietnam agar mempersiapkan diri menghadapi perang dengan RRC (menurut kantor berita

1 *Angkatan Bersenjata*, 6-11-1978

2 *Antara*, 8-11-1978/A

3 *Antara*, 12-12-1978/B

4 *Ibid.*, 14-12-1978/A, & *Kompas*, 15-12-1978

5 *Antara*, 14-12-1978/B

RRC *Xinhua* selama tahun 1978, Vietnam telah tiga kali mengadakan wajib militer dengan menarik semua warganya yang berusia antara 16 dan 45 tahun dan memenuhi syarat, termasuk wanita dan bekas tentara Vietnam Selatan). Vietnam juga menuduh Cina telah menjalankan suatu strategi ekspansi dan hegemonisme.¹

Menjelang akhir tahun 1978, pasukan perbatasan Vietnam dan RRC beberapa kali terlibat dalam bentrokan bersenjata. Kedua negara saling protes dan menuduh satu sama lain melakukan pelanggaran wilayahnya. Sementara itu, Kepala Kantor Urusan Cina Seberang Lautan, Liao Chenzhih, mengatakan pada akhir Konferensi Nasional mengenai Urusan-urusan Cina Perantauan yang berlangsung di Beijing tanggal 22-28 Desember 1978, bahwa Vietnam agar menghentikan pemburuan terhadap orang-orang Cina dan keturunan Cina, termasuk 180.000 yang telah diusir dari Vietnam. Jika Vietnam tidak memperhatikan peringatan Cina itu, mereka akan mendapat hukuman.²

Segera setelah Vietnam melakukan penyerbuan ke Kamboja pada tanggal 25 Desember 1978, Cina secara berangsur-angsur mulai menggerakkan pasukan-pasukan dan pesawat-pesawat tempurnya ke daerah perbatasan. Sebelumnya telah terdapat sebuah markas besar tentara dan kira-kira 50 pesawat tempur.³ Awal Januari 1979, *AFP* di Washington memberitakan juga mengenai gerakan dari kekuatan militer Cina ke daerah perbatasan dengan Vietnam. Dikatakan bahwa RRC telah meningkatkan pertahanannya di propinsi Yunnan dan Guangxi dengan menempatkan sejumlah pesawat tempur Mig-19 dan pembom Ilyushin-28. Gerakan militer Cina yang mengancam perbatasan Vietnam itu, mungkin dimaksudkan sebagai peringatan kepada Vietnam agar segera menghentikan aksi ofensifnya terhadap Kamboja. Sementara itu kedua pihak masih saling menuduh melakukan penyerbuan terhadap pos-pos perbatasan di dalam wilayahnya yang menewaskan orang-orang sipil dan tentara perbatasan mereka. Tanggal 19 Januari 1979, Vietnam menyampaikan nota protes kepada RRC melalui Kedutaan Besar RRC di Hanoi mengenai pelanggaran wilayah Vietnam oleh RRC dan menyatakan bahwa tindakan-tindakan RRC itu membuktikan politik permusuhan Pemerintah RRC terhadap Vietnam.⁴

Sejak jatuhnya Phnom Penh (7 Januari 1979), ketegangan di daerah perbatasan RRC—Vietnam kian meningkat. Di samping banyak terjadi insiden dan serentetan protes dari kedua belah pihak saling bertukar, RRC kabarnya telah memanggil semua perajurit yang sedang cuti dan memusatkan pasukannya di kawasan yang berbatasan dengan Vietnam. Menurut sumber-sumber

1 *Ibid.*, 15-12-1978/B

2 *Ibid.*, 29-12-1978/B

3 "China's Awkward Little War", *The Economist*, February 17, 1979

4 *Antara*, 21-1-1979/AB

militer Barat, terdapat kira-kira setengah juta pasukan di kawasan militer Canton dan Kunming yang berbatasan dengan Vietnam, dan sekitar 160.000 telah dibawa ke dekat perbatasan Vietnam. Di samping itu, Beijing juga telah mengerahkan hampir 700 pesawat tempur, yang meliputi pesawat F-9 buatan RRC, Mig-19 dan Mig-21 ke pangkalan dekat perbatasan.¹ Sumber-sumber militer di Beijing menyangsikan bakal terjadinya serangan besar-besaran Cina terhadap Vietnam, tetapi mereka juga tidak menganggap mustahil akan adanya aksi-aksi secara terbatas dan bersifat menghukum Hanoi.

Surat kabar Jepang *Yomiuri Shimbun* tanggal 8 Pebruari 1979 membenarkan bahwa RRC telah mengerahkan ratusan pesawat terbangnya ke RRC bagian selatan dekat perbatasan dengan Vietnam. Di lain pihak gerakan militer Cina itu tampaknya diimbangi juga oleh Uni Soviet. Menurut surat kabar Jepang itu, empat buah kapal perang Uni Soviet telah berada di Laut Cina Selatan di lepas pantai Vietnam. Sementara itu, kapal induk "Constellation" serta beberapa Fregat dari Angkatan Laut AS juga telah berada di kawasan tersebut. Informasi mengenai gerakan militer RRC, Uni Soviet dan AS itu dibenarkan oleh penguasa AS,² sehingga ketegangan di kawasan itu semakin gawat ditengah memuncaknya sengketa perbatasan RRC—Vietnam.

Insiden-insiden berdarah di sepanjang perbatasan RRC—Vietnam semakin meningkat lagi selama beberapa hari di awal bulan Pebruari 1979. Sementara itu Wakil PM RRC Deng Xiaoping menyingkapkan dalam kunjungannya ke AS (tanggal 28 Januari - 5 Pebruari 1979) mengenai kemungkinan bahwa Cina harus memberikan sesuatu "pelajaran" kepada Vietnam. Dalam pertemuannya dengan Deng Xiaoping, Presiden Carter menekankan keprihatinannya terhadap meluasnya permusuhan di Asia Tenggara. Tetapi Deng Xiaoping tidak memberikan jaminan bahwa tidak akan ada suatu serbuan Cina ke Vietnam. Ia berkali-kali menyebut Vietnam sebagai "Kuba di Asia", dan bersikeras bahwa mereka harus diberikan suatu pelajaran. Dikatakan bahwa Cina tidak akan bertindak secara tergesa-gesa. Sedang selama pertemuannya dengan sekelompok Senator AS, Deng Xiaoping menandakan bahwa "kadang-kadang kami mungkin terpaksa melakukan sesuatu yang tidak ingin kami lakukan".³ Pernyataan yang bernada ancaman itu diulangi lagi ketika Wakil PM RRC itu singgah di Jepang tanggal 6-8 Pebruari dalam perjalanan kembali dari AS. Ia mengatakan kepada (bekas) PM Jepang Masayoshi Ohira, bahwa RRC mungkin akan mengambil tindakan-tindakan atau sanksi-sanksi tertentu terhadap Vietnam karena tindakan provokasi bersenjata di perbatasan RRC, dan campurtangannya di Kamboja. Masalah Indocina mengang-

1 Nayan Chanda, "Mustering for a Battle on the Border", *Far Eastern Economic Review*, February 16, 1979, hal. 10

2 *Antara*, 8-2-1979/B

3 "Bearbaiting", *Newsweek*, February 12, 1979, hal. 8

cam perdamaian di Asia dan dunia, karena persoalannya bukan hanya menyangkut RRC atau Vietnam, tetapi seluruh dunia. Ditambahkannya bahwa tindakan RRC terhadap Vietnam akan dilakukan secara "bijaksana".¹ Meskipun demikian, Vietnam tampaknya tidak menanggapi ancaman-ancaman Cina itu secara serius, bahkan sebaliknya mereka juga mengancam untuk memberikan "pelajaran" kepada RRC, dan menganggap ancaman Cina sebagai gertakan belaka. Di samping itu, belum terdapat petunjuk bahwa Vietnam telah memperkuat pasukannya di sepanjang perbatasan dengan Cina.

Tanggal 9 Pebruari 1979 Vietnam mengajukan protes kepada RRC sehubungan dengan insiden-insiden dan pelanggaran wilayah Vietnam oleh pesawat-pesawat RRC. Kementerian Luar Negeri Vietnam juga menghimbau PBB agar meninjau dan mengambil langkah-langkah seperlunya untuk menanggulangi situasi di perbatasan RRC—Vietnam, karena tindakan dan pelanggaran RRC terhadap wilayah Vietnam merupakan pelanggaran atas Piagam PBB dan meremehkan asas-asas Hukum Internasional. Sebaliknya pihak RRC juga mengajukan protes kepada Vietnam mengenai pelanggaran wilayah RRC dan serangan terhadap penduduk sipil RRC yang mengakibatkan beberapa penduduk tewas atau luka-luka. Dikatakan bahwa situasi yang gawat di sepanjang perbatasan kedua negara sengaja ditimbulkan oleh Pemerintah Hanoi.² Tanggal 13 Pebruari, Vietnam menuntut agar pasukan RRC yang kabarnya menduduki Bukit 400 di Distrik Cao Loc, propinsi Lang Son di timur laut Hanoi, segera ditarik kembali. Namun pihak RRC sebaliknya menyatakan bahwa pengawal-pengawal perbatasan RRC telah menghukum orang-orang Vietnam bersenjata yang menduduki beberapa daerah perbukitan RRC.³ Sementara itu Wakil PM Vietnam Nguyen Duy Trinh mengatakan dalam suatu wawancara dengan kantor berita Perancis *AFP* bahwa negaranya tetap ingin berunding dengan RRC untuk menyelesaikan sengketa kedua negara, tetapi RRC selalu menolak dan tetap ingin meneruskan permusuhan dengan menimbulkan kesulitan-kesulitan di Vietnam yang merintang keinginan ekspansionisme Cina di Asia Tenggara. Trinh mengakui hubungan Vietnam dengan RRC di segala segi sudah semakin memburuk dan menurut pejabat tinggi Vietnam itu, RRC makin merasa terpukul ketika rejim Pol Pot dan Ieng Sary yang didukungnya di Kamboja berhasil digulingkan.⁴

III. PERANG PERBATASAN RRC—VIETNAM 1979

Tanggal 17 Pebruari 1979, pasukan-pasukan RRC yang ditunjang oleh artileri, tank-tank dan pesawat-pesawat terbang ringan melancarkan serangan

1 *Antara*, 8-2-1979/A

2 *Ibid.*, 12-2-1979/B

3 *Ibid.*, 15-2-1979/A

4 *Kompas*, 10 Pebruari 1979

besar-besaran ke dalam wilayah Vietnam dari pelbagai jurusan di sepanjang perbatasan kedua negara. Serbuan pihak RRC ini dilakukan hanya sehari setelah Kementerian Luar Negeri RRC mengirim peringatan keras kepada Vietnam melalui Kedutaan Besar Vietnam di Beijing, yang menyatakan bahwa pihak Cina sungguh-sungguh memperingatkan penguasa-penguasa Vietnam agar segera menghentikan semua provokasi bersenjata serta serangan dan pembunuhan terhadap tentara dan penduduk Cina di daerah sepanjang perbatasan, atau Vietnam harus memikul tanggung jawab penuh atas semua akibat yang timbul.¹ Kantor berita Jepang *Kyodo* melaporkan dari Beijing bahwa pimpinan Partai Komunis Cina telah memutuskan untuk melancarkan serangan "membela diri" yang terorganisasi terhadap Vietnam. Keputusan Cina untuk memerangi Vietnam ini merupakan hukuman atas tindakan keras Vietnam terhadap rakyat Cina yang mendiami daerah perbatasan. RRC juga menyalahkan Vietnam atas terjadinya insiden-insiden di perbatasan itu. Sementara itu pihak Vietnam meminta PBB agar segera bersidang guna mendengarkan laporan-laporan mengenai tindakan-tindakan Cina, dan mengambil langkah-langkah seperlunya guna mendesak Cina agar menghentikan agresinya dan menarik tentaranya dari Vietnam. Sebelumnya RRC juga menghimbau PBB untuk mengecam keras provokasi bersenjata Vietnam di sepanjang perbatasan kedua negara dan segera mengambil langkah-langkah seperlunya guna menghentikannya.²

Kantor berita resmi Cina *Xinhua* yang melaporkan mengenai pernyataan resmi Cina pada tanggal 18 Februari 1979 menyatakan bahwa serangan Cina ke Vietnam hanya dimaksudkan untuk "menghukum" Vietnam karena serbuan dan penaklukannya atas Kamboja. "Kami tidak menghendaki seincipun dari wilayah Vietnam." "Setelah menghantam kembali kaum agresor Vietnam sejauh yang diperlukan, pasukan perbatasan Cina akan kembali mengawal perbatasan negerinya."³ Selanjutnya dikatakan bahwa tentara perbatasan RRC terpaksa melancarkan "serangan balasan" terhadap agresor-agresor Vietnam di propinsi-propinsi Guangxi dan Yunnan untuk mempertahankan perbatasan negaranya. *Xinhua* juga memberitakan bahwa Pemerintah RRC bersedia untuk memulai perundingan konkrit dengan Vietnam untuk mengusahakan tindakan-tindakan konstruktif yang perlu diambil guna memelihara perdamaian dan stabilitas di perbatasan kedua negara.⁴ Sementara itu *Reuter* melaporkan dari Beijing bahwa pejabat-pejabat Cina telah memberitahu para diplomat asing di Beijing bahwa perang RRC dengan Viet-

1 *Antara*, 17-2-1979/A

2 *Kompas Minggu*, 18 Februari 1979

3 "China Moves South", *Newsweek*, February 26, 1979, hal. 26

4 *Antara*, 19-2-1979/A

nam hanya bersifat terbatas baik waktu maupun ruang lingkupnya. Hal ini dibenarkan juga oleh Wakil PM RRC Deng Xiaoping.¹

Sementara pertempuran di perbatasan dengan Vietnam masih terus berlangsung, RRC yang peka terhadap ancaman serangan Uni Soviet di perbatasannya bagian utara dan barat, menempatkan pasukannya dalam keadaan siap tempur. Sebagian penduduk dari propinsi yang berbatasan dengan Uni Soviet diungsikan ke wilayah lain di RRC (pasukan Uni Soviet yang ditempatkan di sepanjang perbatasan dengan RRC -- yang panjangnya sekitar 4.800 km -- diperkirakan berjumlah lebih dari 650.000 orang. Dan selama serbuan Cina ke Vietnam, Uni Soviet beberapa kali memperingatkan Cina agar menghentikan agresinya terhadap Vietnam sebelum waktunya terlambat). Sebuah komunike Komite Sentral Partai Komunis Cina menyatakan bahwa sikap Cina sudah jelas. Dalam konflik dengan India tahun 1962 dan dengan Uni Soviet tahun 1969, tentara Cina ditarik mundur setelah melakukan penyerbuan ke wilayah negara lain. Cina memerlukan perbatasan-perbatasan yang stabil dan damai, dan siap menghadapi segala kemungkinan intervensi.² Pernyataan serupa disampaikan juga oleh Ketua Partai Komunis Cina/PM Hua Guofeng yang mengatakan kepada Ketua Komisi MEE, Roy Jenkins (yang sedang berkunjung ke RRC) di Beijing tanggal 24 Pebruari 1979, bahwa RRC telah memperhitungkan dengan seksama segala resiko yang mungkin timbul termasuk intervensi Uni Soviet sebelum melancarkan serangan balasan terhadap Vietnam.³ Sementara itu sumber-sumber intel di Bangkok mengatakan bahwa beberapa pesawat pengintai TU-95 "Beruang" Uni Soviet (yang semula diberitakan Badan Pertahanan Jepang melintas di wilayah udara Jepang tanggal 21 Pebruari), tanggal 22 Pebruari melintasi propinsi Quang Ninh di Vietnam. Sementara satuan tugas Angkatan Laut Uni Soviet yang terdiri dari 10 kapal perang termasuk kapal komando Armada Pasifik Soviet "Admiral Senyavin", sebuah kapal penjelajah dan amfibi-amfibi pengangkut pasukan serta kapal-kapal intelijen elektronik, berada di perairan dekat propinsi Quang Ninh di Laut Cina Selatan.⁴ Dikuatirkan bahwa Vietnam akan menggunakan kesempatan ini untuk merebut Kepulauan Paracel di bawah lindungan kekuatan Angkatan Laut Uni Soviet (Tahun 1974 pasukan-pasukan RRC menduduki sebagian kecil dari kepulauan itu yang disebutnya dari (bekas) Angkatan Laut Vietnam Selatan). Akan tetapi hal ini tidak terjadi, karena tampaknya kehadiran kapal-kapal Uni Soviet itu terutama dimaksudkan sebagai peringatan bagi Cina bahwa Uni Soviet siap melibatkan

1 *Kompas*, 20 Pebruari 1979

2 *Kompas*, 22 Pebruari 1979

3 *Suara Karya*, 26 Pebruari 1979

4 *Kompas*, 23 Pebruari 1979. Lihat juga, Russel Spurr, "A Quick Bout.....or a Slugging Match", *Far Eastern Economic Review*, March 2, 1979, hal. 10

kekuatan militernya secara langsung untuk membantu Vietnam dalam melawan serbuan RRC. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa mungkin dengan memperhitungkan situasi seperti itu (intervensi Uni Soviet), para pemimpin RRC telah memutuskan agar tindakan menghukum Vietnam dibatasi baik waktu maupun ruang lingkupnya.

Menanggapi pernyataan RRC yang menyatakan bahwa serbuannya ke Vietnam baru akan dihentikan jika tujuannya telah tercapai, para pengamat di Bangkok mengatakan bahwa sebenarnya tujuan RRC itu telah tercapai. Dikatakan bahwa RRC mempunyai lima tujuan obyektif dalam melancarkan serbuannya ke Vietnam, yakni: (1) menghancurkan infrastruktur militer Vietnam yang mengancam daerah otonom Guangxi dan propinsi Yunnan; (2) menghancurkan tentara reguler Vietnam; (3) memaksa Vietnam menarik sebagian pasukannya dari Laos dan Kamboja untuk memberi kesempatan kepada kaum nasionalis kedua negara itu menyusun kekuatan (dalam menghadapi serbuan Cina, Vietnam telah menarik sekitar 3 divisi dari tentaranya yang ditempatkan di Kamboja, dan dua divisi lainnya dari Laos, untuk memperkuat pasukannya); (4) menunjukkan kepada dunia internasional bahwa di bagian dunia itu RRC tidak dapat dipermainkan; (5) menunjukkan kepada AS dan Eropa bahwa RRC tidak mau mengalah pada ancaman Uni Soviet.¹

Wakil PM RRC Deng Xiaoping mengatakan kepada pimpinan kantor berita Jepang *Kyodo*, Takeji Watanabe, bahwa tindakan militer Cina tidak akan lebih lama daripada pertempuran 33 hari dengan India tahun 1962. Tetapi ia tidak menutup kemungkinan bahwa aksi militer itu dapat berlangsung lebih lama. Pernyataan Deng Xiaoping ini bisa berarti bahwa RRC telah mulai menetapkan lagi tujuan dari perang itu sesuai dengan prestasi tentaranya di medan pertempuran. Kabarnya, Vietnam telah mulai mendatangkan pasukan regulernya ke Utara, sementara Cina mengamankan posisinya di bukit-bukit bagian selatan perbatasannya, daripada mengancam Hanoi. Deng membenarkan bahwa 17 divisi pasukan Cina berada di perbatasan (seluruhnya berjumlah 225.000 orang), dan 75.000 - 85.000 diantaranya telah berada di wilayah Vietnam. Hal ini memberikan kesan bahwa pasukan Cina menghendaki kemenangan yang lebih spektakuler daripada yang sebegitu jauh telah dicapai.²

Sementara pertempuran masih terus berlangsung, Wakil PM RRC Deng Xiaoping juga telah mengatakan di Beijing tanggal 26 Pebruari bahwa kecil sekali kemungkinan Uni Soviet akan ikut campur tangan dalam pertempuran itu. Selanjutnya dikatakan bahwa RRC menyambut baik Resolusi Dewan

1 *Berita Buana*, 24 Pebruari 1979

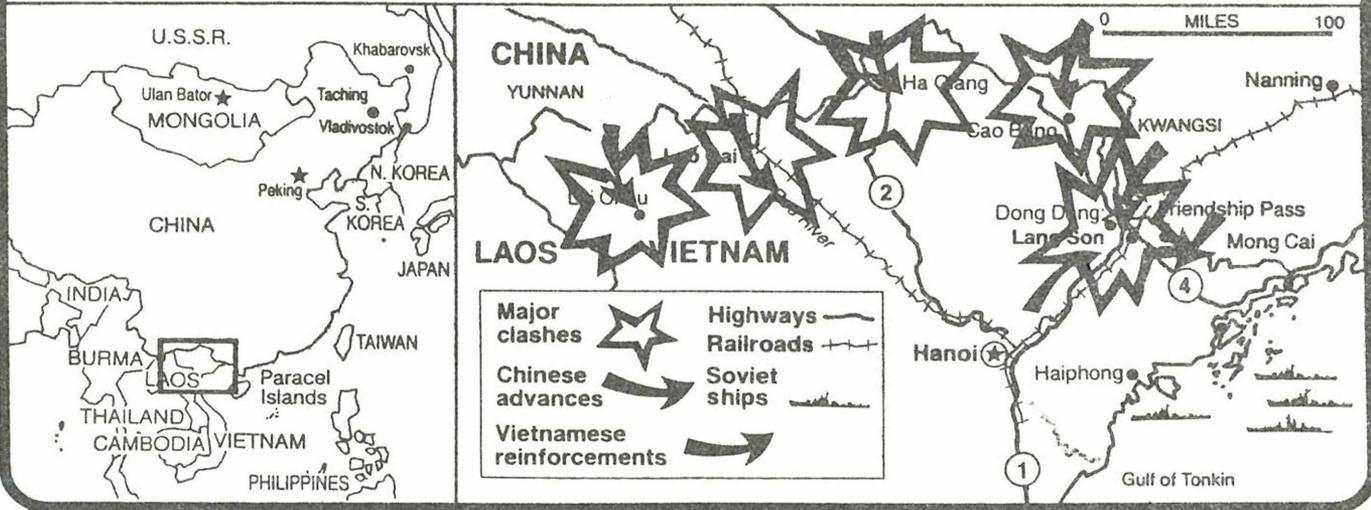
2 David Bonavia, "Sowing the Seeds of A Bigger War", *Far Eastern Economic Review*, March 9, 1979, hal. 12

Communist vs. Communist ¹

Peking's troops outnumber those of Hanoi and Moscow, but China's foes have superior weapons. The Soviet Union could reinforce its troops from bases in Europe, China from bases facing Taiwan and Vietnam from units in Cambodia.

	Troops	Tanks	Warplanes	Major Ships	Submarines	Patrol Craft
Soviet Far Eastern forces	650,000	12,000	1,600	65	70	620
Chinese forces	In Soviet border area	1.4 million	4,700	3,500	23	600
	On Vietnam front	250,000	1,200	700		
Vietnam forces in the north	150,000	300	300	2	0	75

Source: The International Institute for Strategic Studies, Newsweek estimates



¹ Lihat, "Showdown in Asia", Newsweek, March 5, 1979

Keamanan PBB yang menuntut penarikan pasukan-pasukan Cina dari Vietnam dan pasukan-pasukan Vietnam dari Kamboja. Pernyataan Deng itu menunjuk kepada sebuah usul yang diajukan kepada DK-PBB tanggal 23 Pebruari oleh AS, Jepang, Norwegia dan Portugal yang kemudian didukung oleh Inggris dan Perancis. Sidang DK-PBB gagal mencapai suatu kompromi mengenai cara bagaimana mengakhiri pertempuran-pertempuran di Indocina, dan terpaksa menunda sidangnya dua kali karena kesulitan menyusun resolusi yang dapat diterima semua pihak. Tanggal 16 Maret 1979, Uni Soviet memveto sebuah resolusi yang menyerukan penarikan semua pasukan asing dari Indocina, yang telah diajukan oleh negara-negara ASEAN, setelah sebelumnya menolak permintaan DK-PBB agar Vietnam menarik pasukannya dari Kamboja. Duta Besar Uni Soviet untuk PBB, Oleg Troyanovsky, mengatakan bahwa situasi di Vietnam dan Kamboja tidak dapat disatukan, karena kehadiran militer Vietnam di Kamboja adalah atas permintaan negara itu, sedang kehadiran militer RRC di Vietnam merupakan suatu penyerbuan.¹

Tajuk rencana surat kabar *Harian Rakyat* Beijing tanggal 27 Pebruari 1979 menyatakan bahwa RRC akan mengakhiri tindakan "menghukum" Vietnam jika Vietnam setuju untuk berunding. Tindakan Uni Soviet yang menghasut Vietnam agar jangan mau berunding, tidak hanya merugikan kepentingan RRC dan Vietnam, tetapi juga mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia-Pasifik. Sementara itu kantor berita Uni Soviet *Tass* sebelumnya telah mengatakan bahwa kunjungan Menteri Keuangan AS, Michael Blumenthal, Menteri Negara Urusan Industri Inggris, Eric Varley, dan Ketua MEE, Roy Jenkins, ke RRC, dapat ditafsirkan sebagai tanda setuju atas tindakan-tindakan RRC, yang berarti sama saja dengan "bermain api".²

Tanggal 28 Pebruari 1979, Vietnam menolak tawaran berunding dari pihak RRC dan menyatakan bahwa satu-satunya cara penyelesaian peperangan adalah penarikan pasukan RRC dari Vietnam.³ Tanggal 1 Maret 1979, pihak RRC mengatakan bahwa penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja dan pasukan RRC dari Vietnam merupakan kunci untuk meredakan ketegangan di Asia Tenggara, sesuai dengan prinsip-prinsip yang menyerukan agar semua negara tidak mencaplok atau menduduki wilayah negara lain dengan kekuatan bersenjata. Wakil PM RRC Li Xiannian mengatakan kepada wartawan-wartawan asing di Beijing bahwa RRC pasti akan menarik pasukannya dari Vietnam jika "tujuan-tujuannya" telah tercapai, tanpa menunggu persetujuan Vietnam untuk merundingkan konflik mereka, dengan syarat bahwa Vietnam tidak lagi melakukan provokasi-provokasi bersenjata di sepanjang perbatasan kedua negara. Tidak ada kaitan antara perang perbatasan itu

1 *Antara*, 18-3-1979/AB

2 *Antara*, 27-2-1979/B

3 *Suara Karya*, 1-3-1979

dengan perang di Kamboja. Selanjutnya dikatakan bahwa RRC telah berhasil menghancurkan dua atau tiga divisi tentara Vietnam (menurut para pengamat, pernyataan yang terakhir ini merupakan salah satu tujuan dari serbuan RRC ke Vietnam).¹ Isyarat penarikan pasukan RRC itu juga disampaikan oleh seorang Wakil PM RRC lainnya, Gu Mu, pada tanggal 2 Maret 1979, yang menyatakan bahwa karena serangan balasan RRC untuk membela diri telah berjalan lancar (menghancurkan beberapa divisi tentara Vietnam), maka Cina akan segera menarik pasukannya sesuai dengan rencana.

Sementara Vietnam masih juga menolak usul perundingan dari RRC dan mengatakan bahwa usul seperti itu hanya untuk mengelabui pendapat umum dunia, Wakil PM RRC Li Xiannian mengatakan kepada wartawan *Yomiuri Shimbun* (surat kabar Jepang) di Balai Agung Rakyat di Beijing tanggal 5 Maret 1979 bahwa RRC berhasil melaksanakan tujuan dari langkah hukumannya terhadap Vietnam, dan akan menarik pasukannya dari Vietnam setelah jatuhnya kota strategis Lang Son (tanggal 2 Maret 1979) 130 km timur laut Hanoi, tetapi akan melancarkan suatu serangan balasan lainnya jika Vietnam mencoba-coba menyerang pasukan RRC yang sedang mundur itu. Masalah utama dalam konflik tapal batas yang berlangsung itu bukanlah masalah wilayah. Cina tidak akan memaksakan penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja sebagai suatu prasyarat bagi penarikan pasukan Cina dari Vietnam.² Pada waktu yang sama, kantor berita resmi Cina *Xinhua* mengumumkan bahwa RRC telah mulai menarik kembali pasukan-pasukannya dari Vietnam. Bersamaan dengan pengumuman itu, RRC juga menghimbau seluruh dunia agar mendesak Vietnam menarik pasukan-pasukannya dari Kamboja, dan mengulangi lagi seruannya kepada Hanoi agar segera memulai perundingan guna membicarakan cara-cara menjamin perdamaian dan ketenangan di sepanjang perbatasan kedua negara, dan dilanjutkan dengan menyelesaikan sengketa-sengketa perbatasan dan wilayah.³ Akan tetapi di lain pihak, Dewan Nasional Vietnam malah mengumumkan mobilisasi umum di negara itu untuk menghadapi serbuan Cina, dan memperingatkan perwakilan-perwakilan asing agar bersiap-siap mengungsikan warga negaranya.⁴ Sementara itu radio Hanoi tanggal 7 Maret memberitakan bahwa Vietnam tidak akan menghalang-halangi RRC menarik mundur pasukannya dengan damai, tetapi akan menyerang pasukan RRC yang dalam gerak mundurnya melakukan tindakan-tindakan yang semena-mena.⁵

1 *Berita Buana*, 2 Maret 1979

2 *Antara*, 5-3-1979/B

3 *Ibid.*, 6-3-1979/A. Lihat juga, "Peiping's Decision to Withdraw Troops from Vietnam", *Issues & Studies, A Journal of China Studies and International Affairs*, Vol. XV, No. 3, March 1979, hal. 4-7

4 *Kompas*, 7 Maret 1979

5 *Ibid.*, 8 Maret 1979

Proses penarikan mundur pasukan RRC berjalan sangat lamban dan dalam jumlah yang kecil karena pertempuran masih terus terjadi. RRC menyalahkan Vietnam atas berlangsungnya pertempuran yang berlarut-larut itu dan penarikan pasukan RRC dirintangi oleh serangan gencar pasukan Vietnam. Sementara itu kedua belah pihak saling mengumumkan kemenangannya dalam pertempuran itu. Menurut pihak Hanoi, pasukan Vietnam memperoleh kemenangan "besar" dan pasukan RRC "dipaksa mengundurkan diri". Sedang pihak RRC mengatakan bahwa RRC memperoleh kemenangan dan "sudah mencapai tujuan dengan sukses".

Tanggal 17 Maret 1979, Menlu Cina Huang Hua menyatakan bahwa RRC telah merampungkan penarikan pasukannya dari wilayah Vietnam. Sebelumnya Ketua Partai Komunis Cina/PM Hua Guofeng mengatakan pada pertemuannya dengan gubernur Tokyo, Ryokichi Minobe (yang sedang berkunjung ke RRC) di Beijing tanggal 16 Maret, bahwa RRC telah menarik semua pasukannya dari Vietnam dan berharap agar Vietnam segera menarik seluruh pasukannya dari Kamboja. Ditambahkannya bahwa pasukan Cina berhasil mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan semula. (Selama pertempuran itu, pasukan RRC berhasil memasuki wilayah Vietnam sejauh 50 km, dan menurut kantor berita *Xinhua*, pasukan RRC berhasil menduduki tiga ibukota propinsi, lebih dari 20 kota dan tempat-tempat strategis lainnya di dalam wilayah Vietnam). Bersamaan dengan itu, Vietnam menyampaikan sebuah nota diplomatik kepada Cina yang mengusulkan agar kedua negara membicarakan "langkah-langkah yang mendesak" guna menjamin perdamaian dan stabilitas di daerah tapal batas kedua negara. Dan perundingan agar diadakan dalam waktu satu minggu setelah penarikan menyeluruh pasukan Cina ke perbatasan yang telah ditetapkan berdasarkan sejarah kedua negara yang harus dihormati (Cina kabarnya memasang tanda-tanda perbatasan yang baru di dalam wilayah Vietnam dengan tujuan untuk mengubah perbatasan historis kedua negara).¹

Meskipun secara resmi RRC telah mengumumkan bahwa pasukannya telah ditarik kembali dari Vietnam ke dalam wilayahnya, pihak Vietnam mengatakan bahwa sampai dengan akhir Maret 1979 pasukan RRC masih menduduki 11 daerah di dalam wilayah Vietnam. Pertempuran kecil-kecilan dilaporkan masih terus berlangsung di beberapa tempat di daerah sekitar perbatasan kedua negara. Di samping itu, kedua belah pihak bahkan telah memperkuat wilayah perbatasan dengan membangun kubu-kubu pertahanan dan mengerahkan pasukan regulernya, sementara proses menuju ke meja perundingan terus berlangsung, meskipun pada mulanya kedua belah pihak saling menolak usul-usul yang disampaikan untuk memulai perundingan perdamaian.

1 *Sinar Harapan*, 16 Maret 1979

Tampaknya "sengketa perbatasan" RRC—Vietnam itu belum juga akan berakhir, karena insiden-insiden di daerah perbatasan kedua negara itu masih terus terjadi dari waktu ke waktu. Bahkan para pemimpin RRC berulang kali mengancam untuk memberikan "pelajaran" lainnya kepada Vietnam. Kehadiran Uni Soviet di Vietnam, baik melalui bantuan peralatan militer, penasehat dan perekonomian, maupun kehadiran yang nyata dari kapal-kapalnya di pangkalan Da Nang dan Cam Ranh, menambah sulit dan kompleksnya masalah sengketa RRC dan Vietnam. Sementara itu masalah Kamboja belum juga terselesaikan.

IV. PERBATASAN RRC—VIETNAM TETAP GAWAT

Ketegangan antara RRC dan Vietnam meningkat lagi setelah kedua belah pihak saling menuduh dan tindakan provokasi bersenjata di perbatasan bersama mereka. Tanggal 5 Juli 1980, RRC menolak seruan Vietnam untuk membuka kembali perundingan tahap ketiga antara kedua negara.¹ Sebelumnya (tanggal 23 Juni 1980), Kementerian Luar Negeri RRC dalam nota resminya kepada Kedutaan Besar Vietnam di Beijing telah membekukan perundingan normalisasinya dengan Vietnam yang telah ditangguhkan sejak bulan Maret 1980 oleh pihak RRC dengan alasan bahwa Wakil Menlu RRC, Han Nian-long, yang menangani perundingan itu "terlalu sibuk". Pihak RRC juga mengatakan bahwa situasi dan iklim sekarang ini sangat tidak menguntungkan untuk mengadakan perundingan tahap ketiga antara kedua negara. Selain itu RRC juga menuduh Vietnam memanfaatkan perundingan untuk membenarkan "agresi Vietnam di Kamboja". Hanoi juga dikatakan tidak menunjukkan kesungguhan dalam perundingan, dan justru meningkatkan kegiatan memusuhi RRC, tetap bersikeras menduduki Kamboja, dan terus melakukan politik hegemoni regional.²

Sejak perang perbatasan bulan Pebruari-Maret 1979, RRC dan Vietnam telah dua kali melakukan perundingan perdamaian yang dimulai bulan April tahun yang sama. Perundingan tahap pertama diadakan di Hanoi dan yang kedua diadakan di Beijing. Akan tetapi kedua perundingan itu tidak mencapai hasil yang diharapkan dapat menormalkan kembali hubungan kedua negara itu yang secara resmi masih mempunyai hubungan diplomatik.

Yang menarik perhatian dari meningkatnya lagi ketegangan antara RRC dan Vietnam ini justeru terjadi setelah penyerbuan pasukan Vietnam dari wilayah Kamboja ke dalam wilayah Muangthai tanggal 23 Juni 1980. Sikap

1 *Kompas*, 6 Juli 1980

2 *Kompas*, 25 Juni 1980

saling menuduh melakukan tindakan provokasi bersenjata di perbatasan bersama kedua negara itu, sebenarnya bukan merupakan berita yang baru lagi. Oleh karena sejak berakhirnya perang perbatasan awal tahun 1979, situasi di perbatasan kedua negara itu boleh dikatakan tidak pernah damai. Hal ini juga ternyata dari tuduhan yang dilontarkan oleh *Harian Rakyat* di Beijing yang menyatakan bahwa selama empat belas bulan terakhir sejak perang perbatasan itu, Vietnam telah melakukan sebanyak 2.000 tindakan provokasi bersenjata terhadap penduduk perbatasan RRC terutama di propinsi Guangxi dan Yunnan yang berbatasan dengan Vietnam. Dikemukakan pula bahwa tindakan provokasi ini bersamaan dengan meningkatnya pula ketegangan di perbatasan Muangthai—Kamboja. Selanjutnya dikatakan bahwa tindakan provokasi bersenjata Vietnam di perbatasan dengan RRC itu, dimaksudkan untuk mengalihkan opini dunia dari masalah intervensi militer Uni Soviet di Afghanistan dan juga dari invasi Vietnam sendiri di Kamboja serta aksi-aksi militer lainnya di perbatasan Kamboja—Muangthai. RRC juga membantah tuduhan Vietnam yang dikatakan sedang mempersiapkan perang terhadap Vietnam dengan mengadakan manuver militer pada tingkat resimen dan divisi di dekat perbatasan Vietnam.¹ Sebaliknya Vietnam juga menuduh Cina melakukan tindakan provokasi bersenjata di perbatasannya meskipun dengan porsi yang berbeda. Bahkan radio Hanoi memberitakan terjadinya duel artileri antara pasukan RRC dan Vietnam di propinsi Cao Bang (bagian utara Vietnam) tanggal 6 Juli 1980, yang menimbulkan banyak korban. Dan selama bulan Juni 1980 saja, RRC dikatakan telah melakukan 200 tindakan provokasi bersenjata terhadap Vietnam.²

Situasi seperti ini juga terjadi sebelum RRC melancarkan serangan besar-besaran ke dalam wilayah Vietnam bulan Pebruari-Maret 1979, dengan dalih untuk memberikan "suatu pelajaran" kepada Vietnam. Dan seteah perang perbatasan itu berakhir, RRC masih terus mengancam Vietnam bahwa RRC mungkin akan melakukan tindakan militer lagi terhadap Vietnam. Dan kini yang menjadi masalah adalah apakah ada kemungkinan RRC akan melancarkan suatu tindakan untuk "memberikan pelajaran yang kedua" terhadap Vietnam, meskipun dalam situasi meningkatnya lagi ketegangan di perbatasan kedua negara itu, tampaknya RRC belum mengeluarkan nada ancaman yang serupa dan sesering seperti apa yang dilakukannya sebelum menyerbu Vietnam awal tahun 1979.

1 *Kompas*, 6 Juli 1980

2 *Berita Buana*, 9 Juli 1980

V. PANDANGAN DAN SIKAP RRC TERHADAP SERBUAN VIETNAM KE MUANGTHAI

Kegagalan RRC untuk mempertahankan sekutunya Pemerintah Khmer Merah pimpinan Pol Pot dan Ieng Sary di Kamboja, merupakan suatu pukulan bagi RRC. Untuk itu RRC terus mendukung perjuangan perlawanan Khmer Merah yang sampai kini belum berhasil diatasi seluruhnya oleh pasukan rejim baru Kamboja pimpinan Heng Samrin yang didukung sepenuhnya oleh Vietnam, bahkan kabarnya kekuatan Khmer Merah telah bertambah lagi. Serangan RRC ke Vietnam awal tahun 1979 dengan dalih memberikan suatu pelajaran kepada Vietnam -- apapun alasan versi RRC -- merupakan salah satu upaya RRC untuk mengalihkan perhatian Vietnam dari invasinya di Kamboja. Namun kenyataannya, Vietnam tetap tidak beranjak dari bumi Kamboja, bahkan meningkatkan operasi pembersihannya terhadap Khmer Merah yang kemudian terdesak ke Kamboja bagian barat yang berbatasan dengan Muangthai. Dengan bantuan persenjataan dari RRC yang disalurkan melalui wilayah Muangthai, dan bantuan pangan dari berbagai organisasi pertolongan internasional (yang sebenarnya ditujukan kepada rakyat Kamboja yang kelaparan, tetapi sebagian jatuh ke tangan Khmer Merah dan juga Khmer Serei yang anti komunis), pasukan Khmer Merah dan para pendukungnya masih terus dapat bertahan dan melakukan perlawanan terhadap rejim Heng Samrin dan pasukan pendudukan Vietnam. Pertempuran di Kamboja bagian barat antara pasukan gerilya Khmer Merah dan atau Khmer Serei melawan pasukan Heng Samrin yang didukung Vietnam dalam usahanya melakukan pembersihan terhadap kaum gerilya itu, telah beberapa kali melimpah ke dalam wilayah Muangthai.

Sejak jatuhnya Pemerintah Khmer Merah di Kamboja, RRC telah memberikan jaminannya kepada Muangthai bahwa RRC akan membela Muangthai jika Vietnam melancarkan invasi ke negara itu. Kekuatiran RRC (dan juga AS dan negara-negara ASEAN) terhadap kemungkinan Vietnam melakukan serangan terhadap Muangthai berdasarkan pada anggapan dan tuduhannya terhadap Vietnam yakni bahwa Vietnam berambisi untuk memperluas politik hegemoni regionalnya, ternyata menjadi kenyataan ketika pasukan Vietnam di Kamboja melancarkan serangan ke dalam wilayah Muangthai pada tanggal 23 Juni 1980. Kabarnya, pasukan Vietnam itu berhasil masuk sejauh dua kilometer ke dalam wilayah Muangthai dan menduduki tiga buah desa Muangthai serta kamp "204" tempat penampungan pengungsi Kamboja. Serangan yang menimbulkan banyak korban jiwa ini, terutama pengungsi, berhasil diatasi dengan serangan balasan pasukan Muangthai yang didukung tank-tank dan tembakan artileri serta roket-roket yang ditembakkan

dari helikopter, pasukan penyerbu itu dapat dihalau kembali ke wilayah Kamboja.¹

Jika dikaitkan dengan politik luar negeri RRC terhadap Asia Tenggara umumnya dan Muangthai khususnya, maka serbuan pasukan Vietnam dari wilayah Kamboja ke Muangthai -- apapun alasannya -- merupakan suatu peringatan bagi RRC akan adanya ancaman terhadap kepentingannya (dalam rangka apa yang disebut sebagai perebutan pengaruh di Asia Tenggara). Oleh karena itu pula RRC mengecam serbuan Vietnam itu, dan mengulangi lagi komitmennya terhadap Muangthai. Setelah berakhirnya perang perbatasan dengan Vietnam awal tahun 1979, RRC sedikit menggalakkan kegiatannya untuk menarik Muangthai ke dalam orbit politiknya di Indocina dan Asia Tenggara umumnya. Tampaknya (pada saat itu) RRC merasa tidak puas dengan sikap Muangthai dalam hubungan dengan Uni Soviet, dan garis politik Pemerintah (bekas Perdana Menteri) Jenderal Kriangsak Chamanand untuk meningkatkan hubungan bertetangga baik dengan Vietnam dan negara-negara Indocina lainnya. Sehubungan dengan itu para peninjau politik mengatakan bahwa proses yang logis dan obyektif untuk memperkokoh kerja sama itu ditanggapi Beijing sebagai ancaman bagi rencana-rencananya. Oleh karena itu pula maka RRC memberikan jaminannya kepada Muangthai, yang berulang-kali diutarakannya, yakni bahwa RRC akan membantu Muangthai seandainya terkena agresi Vietnam. Akan tetapi Pemerintah Muangthai (dan negara-negara ASEAN lainnya) kiranya cukup berhati-hati karena mengetahui wajah lain dari kebijaksanaan RRC itu (Wakil PM RRC Deng Xiaoping dalam kunjungannya ke negara-negara Asia Tenggara akhir tahun 1978, memberikan pernyataan yang memisahkan pengertian hubungan antar-pemerintah dan hubungan antar-partai.² Meskipun demikian, RRC yang merasa dirinya terancam akan tetap berusaha mempertahankan atau menamakan pengaruhnya di Asia Tenggara. Untuk itu RRC terus mendukung Khmer Merah dan menghendaki agar pertempuran di Kamboja berlangsung terus guna mengusir Vietnam dari Kamboja. Bagi RRC, Vietnam sebagai sekutu yang paling dekat dari Uni Soviet di Asia, merupakan ancaman baik bagi keamanan maupun program modernisasinya. Oleh karena itu RRC tidak mau menerima keadaan di mana kaum hegemonis Vietnam yang disebutkan juga sebagai "Kuba di Asia", melakukan tindakan semaunya.

Penyerbuan pasukan Vietnam dari wilayah Kamboja ke Muangthai, terutama bertujuan untuk menentang repatriasi kaum pengungsi Kamboja oleh Muangthai ke daerah yang dikuasai kaum gerilya Khmer Merah di Kamboja, karena menurut pengamatan para pejabat Hanoi, banyak di antara

1 Lihat John McBeth, "Waving a Mailed Fist at ASEAN", *Far Eastern Economic Review*, July 4, 1980, hal. 14-16

2 *Berita Buana*, 1 Mei 1979

pengungsi itu merupakan pendukung Khmer Merah. Mereka kembali ke Kamboja dengan persenjataan baru dan bergabung dengan Khmer Merah memperkuat perlawanan terhadap Vietnam. Di samping itu, penyerbuan Vietnam itu tampaknya merupakan realisasi dari ancamannya terhadap Muangthai beberapa waktu yang lalu, karena Muangthai dianggap melindungi dan mempersenjatai kembali gerilya Khmer Merah dengan senjata yang disuplai dari RRC melalui wilayah Muangthai. Sementara itu, kalangan pemimpin RRC menilai bahwa penyerbuan pasukan Vietnam dari wilayah Kamboja ke Muangthai itu, selain menentang repatriasi pengungsi Kamboja, Vietnam juga mencoba memecah-belah negara-negara ASEAN. Namun ternyata bahwa ASEAN tetap menegaskan kembali sikap solidaritasnya yang terbukti dari pernyataan bersama para Menlu ASEAN sebagai hasil dari sidang para Menlu ASEAN ke-13 yang berlangsung di Kuala Lumpur tanggal 25-26 Juni 1980.¹ RRC juga menilai pernyataan Menteri Luar Negeri Vietnam Nguyen Co Thach dalam kunjungannya ke beberapa Negara ASEAN sebagai 'sandiwara' belaka. Dalam kunjungannya itu Menlu Vietnam itu antara lain menjamin bahwa pasukan Vietnam tidak akan menyerbu Muangthai, tetapi kenyataannya malah sebaliknya. Di samping itu, RRC juga mempertanyakan sikap Menlu Vietnam yang dalam kunjungannya itu tidak menyinggung masalah "Federasi Indocina". Menlu Vietnam Nguyen Co Thach membedakan pengertian "Federasi Indocina" dengan pengertian "Solidaritas Indocina". Dikatakan bahwa Federasi Indocina bukan buatan Vietnam, tetapi telah ada sejak abad ke-19 ketika Perancis menjajah Indocina. Untuk melawan musuh bersama, yakni penjajah, diperlukan solidaritas rakyat Indocina yang kemudian mendirikan Partai Komunis Indocina. Dan maksud membentuk suatu Federasi Indocina terdapat dalam papan penunjuk partai itu. Tetapi pada tahun 1950, Perancis membubarkan apa yang dinamakan Federasi Indocina dan memberikan kemerdekaan kepada ketiga negara Indocina, Vietnam, Laos dan Kamboja sebagai "associated countries". Dan ketika Partai Komunis Indocina dibubarkan pada awal tahun 1951, gagasan mengenai Federasi Indocina dari partai tersebut, juga dibatalkan. Yang kini ada hanya "Solidaritas Indocina", yang secara bilateral, antara Laos—Vietnam dan Kamboja—Vietnam, telah ada persetujuan yang ditandatangani tahun 1977 dan 1979, yang mengakui bahwa Laos, Kamboja dan Vietnam adalah negara merdeka. Oleh karena itu tidak ada lagi alasan untuk menuduh adanya Federasi Indocina.²

Tampaknya RRC beranggapan bahwa dengan sikapnya itu, Menlu Vietnam itu berusaha untuk memperoleh dukungan dari Negara-negara ASEAN

1 *Kompas*, 27 Juni 1980

2 Alfian Muthalib, Hadi Soesastro, A.R. Sutopo, *Pandangan dan Sikap Vietnam Mengenai Beberapa Masalah: Laporan dari Pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Nguyen Co Thach di CSIS, 27 Juni 1980* (terbitan intern)

mengenai apa yang dinamakannya sebagai solidaritas Indocina. Hal ini justru bertentangan dengan sikap RRC yang juga telah menunjukkannya dengan melakukan penyerbuan ke Vietnam awal tahun 1979. RRC tetap menentang adanya Federasi Indocina atau apapun namanya, yang menempatkan Laos dan Kamboja di bawah proteksi Vietnam, yang tak lain merupakan sekutu Uni Soviet, musuh utama RRC.

VI. KESIMPULAN

Penyerbuan RRC ke Vietnam awal tahun 1979 dengan dalih memberikan suatu "pelajaran" atau hukuman terhadap Vietnam karena provokasi bersenjata di perbatasan RRC dan invasinya di Kamboja, tampaknya tidak memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Usaha RRC untuk menyelamatkan Kamboja belum juga berhasil, sementara Vietnam dengan bebannya yang berat di Kamboja maupun kemerosotan perekonomiannya, mau tak mau masih harus bergantung pada Uni Soviet dan negara-negara yang tergabung dalam Comecon. Hal ini justru tidak dikehendaki RRC.

Apapun alasan RRC, memberikan "suatu pelajaran" kepada Vietnam, sebenarnya berkaitan langsung dengan kebijaksanaan politik para pemimpin RRC baik ke dalam (keamanan negerinya demi kelancaran program modernisasinya) maupun ke luar, terutama dalam rangka perebutan pengaruh kekuasaan di kawasan Asia Tenggara.

Menghadapi masalah Indocina (Kamboja) yang masih sulit untuk diselesaikan ditambah lagi dengan penyerbuan pasukan Vietnam dari wilayah Kamboja ke Muangthai, para pemimpin RRC rupanya masih bermimpi buruk mengenai adanya ancaman terhadap negaranya. Dengan cara yang sama seperti menjelang penyerbuannya ke Vietnam awal tahun 1979, RRC meningkatkan "perang mulut" dan "usikan bersenjata" terhadap Vietnam di perbatasan bersama mereka. Di lain pihak, Vietnam juga mengimbanginya dengan cara yang sama pula. Meningkatnya ketegangan di perbatasan kedua negara itu, dan penolakan RRC terhadap usul Vietnam untuk membuka kembali perundingan tahap ketiga antara kedua negara, mungkin merupakan salah satu bentuk komitmen RRC terhadap Muangthai yang diserang Vietnam tanggal 23 Juni 1980. Andaikata ketegangan seperti ini terus berlanjut, maka ada kemungkinan akan terjadi lagi konflik bersenjata antara RRC dan Vietnam. Namun apa dan bagaimana bentuk kemungkinan itu masih sulit untuk diketahui. Dan jika RRC akan memberikan suatu pelajaran yang kedua terhadap Vietnam, maka apapun bentuk dan caranya, RRC tentu tidak akan mau dikatakan bahwa pasukan mereka kembali dari medan pertempuran dengan "hidung berdarah".

Bahwa RRC merasa adanya ancaman karena ulah Vietnam yang melakukan penyerbuan ke dalam wilayah Muangthai, sebenarnya hanya karena anggapan RRC bahwa Vietnam sebagai sekutu dekat Uni Soviet di Asia, tengah meluaskan hegemoni regionalnya. Dan ini berarti juga memperluas pengaruh Uni Soviet melalui Vietnam. Jika ini terjadi, maka beralasan jika RRC merasa akan adanya ancaman terjepit baik dari Selatan (Vietnam) maupun langsung dari Utara dan Barat perbatasan bersamanya dengan Uni Soviet. Oleh karena itu sikap Vietnam dalam hubungannya dengan Uni Soviet maupun dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara merupakan kunci bagi penyelesaian masalah hubungannya dengan RRC maupun masalah Indocina. Hal ini juga merupakan harapan negara-negara Asia Tenggara lainnya demi terciptanya kawasan damai, bebas dan netral di Asia Tenggara.





Untuk menunjang kegiatan studi mahasiswa, para peneliti maupun lembaga-lembaga universitas, instansi-instansi pemerintah dan umum, CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) menyediakan penerbitan berupa majalah dan buku-buku:



ANALISA

terbitan berkala, menyajikan beberapa analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh staf CSIS maupun dari luar CSIS. Termasuk dalam seri ini adalah MONOGRAF yang membahas satu analisa tertentu. Harga per eks Rp. 500,— langganan setahun (12 nomor) Rp. 6.000,— sudah termasuk ongkos kirim, untuk Mahasiswa Rp. 4.800,—



THE INDONESIAN QUARTERLY

Majalah triwulan, memuat karangan-karangan hasil pemikiran, penelitian, analisa dan penilaian yang bersangkutan paut dengan masalah-masalah aktual Indonesia di forum nasional maupun internasional. Harga per eks Rp. 800,—, langganan setahun (4 nomor) Rp. 3.200,—



BUKU—BUKU

hasil penulisan staf CSIS baik mengenai strategi, ekonomi, ideologi, politik, hubungan internasional, pembangunan, hankam, sosial budaya dan lain-lain.



Penerbitan-penerbitan tersebut di atas dapat diperoleh di Toko-toko Buku, atau langsung pada:

BIRO PUBLIKASI — CSIS
CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES
 Jl. Kesehatan 3/13, Jakarta Pusat Telepon 349489

Untuk menunjang kegiatan pengkajian CSIS juga menyediakan PERPUSTAKAAN dan CLIPPINGS yang terbuka untuk pencinta pengetahuan, analisis dan peneliti dengan koleksi yang eksklusif, penyediaan data yang lengkap dan informasi yang cepat. Untuk keperluan tersebut hubungilah:

PERPUSTAKAAN CSIS dan BIRO INFORMASI DAN DATA CSIS
 Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta Pusat, Telepon 356532-5

